

**LAPORAN PELAKSANAAN  
KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK**



**BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
2025**

## KATA PENGANTAR

Forum Konsultasi Publik (FKP) adalah wadah dialog antara instansi penyelenggara layanan publik dan masyarakat untuk membahas, menyempurnakan, atau mengevaluasi standar layanan, prosedur dan mekanisme layanan serta implementasi/ pelaksanaan pelayanan publik. Forum ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas layanan, mendorong transparansi, serta membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Melalui FKP, penyelenggara layanan dapat memahami kebutuhan riil pengguna layanan, mengambil keputusan yang lebih tepat, dan memenuhi kewajiban regulasi terkait keterlibatan publik.

Laporan ini memuat tentang Kegiatan Forum Konsultasi Pelayanan Publik pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan yang melibatkan para stakeholder dan pengguna layanan. Besar harapan kami laporan ini dapat dimanfaatkan dalam peningkatan layanan publik di Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan sebagai salah satu unit penyelenggara layanan publik di lingkup BPPSDMKP. Selanjutnya tanggapan berupa kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan bagi penyempurnaan laporan maupun pelayanan kami kedepan.

Jatiluhur, 21 Juli 2025

Kepala Balai



Ir. Iswari Ratna Astuti

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	2
<b>II. PELAKSANAAN KEGIATAN</b> .....	3
2.1. Waktu dan Tempat.....	3
2.2. Peserta Forum Konsultasi Publik .....	3
2.3. Pelaksanaan Kegiatan .....	3
<b>III. PENUTUP</b> .....	5
3.1. Kesimpulan .....	5
3.2. Saran .....	5
<b>LAMPIRAN KEGIATAN</b> .....	6

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara atas barang, jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah dalam pemenuhan atas barang, jasa dan pelayanan administratif kepada setiap warga negara. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas (prima) menjadi salah satu ciri tata pemerintahan yang baik. Kinerja pelayanan publik sangat besar pengaruhnya terhadap kualitas kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, membangun sistem manajemen pelayanan publik yang handal adalah keniscayaan bagi BRPSDI.

Pada tanggal 30 April 2025, telah terbit Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 yang mengatur tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di lingkungan KKP. Sesuai dengan peraturan tersebut, Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan sebagai salah satu Unit Penyelenggara Layanan Publik di lingkup KKP memberikan layanan sebagai berikut:

1. Layanan Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Kegiatan Perikanan dan Menunjang Kegiatan Perikanan;
2. Layanan Penggunaan Peralatan dan Mesin;
3. Layanan Pengujian Kualitas Air dan Lingkungan;
4. Layanan Konsultasi/Bimtek (Magang)

Sebagai lembaga pelayanan publik pemenuhan kepuasan pelanggan menjadi prioritas kami, hal tersebut merupakan indikator yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam bentuk pelayanan kepada pelanggan dengan senantiasa BRPSDI mengupayakan umpan balik dari pelanggan, baik positif maupun negatif.

Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik tercermin melalui bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban, serta partisipasi aktif dalam proses perumusan kebijakan pelayanan publik, yang mencakup tahapan dari perencanaan hingga evaluasi kebijakan tersebut. Untuk mewujudkan partisipasi ini, diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah sebagai penyelenggara layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan, yang difasilitasi melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Forum ini dilaksanakan dengan prinsip komunikasi dua arah, di mana masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan usulan, masukan, dan saran terhadap layanan publik yang telah diterima

## **1.2. Dasar Hukum**

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan forum konsultasi publik BRPSDI Tahun 2025 yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. PermenKP No. 15 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
3. PP No. 85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif PNBK yang berlaku pada Kementerian KKP.
4. Keputusan Menteri KP No. 54 Tahun 2022 Tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

## **1.3. Maksud dan Tujuan**

Kegiatan forum konsultasi publik BRPSDI Tahun 2025 dilaksanakan dengan maksud dan tujuan untuk:

1. Mengevaluasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan Keputusan
3. Membangun jaringan dan kerjasama dengan stakeholder

## II. PELAKSANAAN KEGIATAN

### 2.1. Waktu dan Tempat

Pelaksanaan kegiatan Forum Konsultasi Publik BRPSDI Tahun 2025 dilaksanakan pada Tanggal 17 Juli 2025, bertempat di aula Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan, Jalan Cilalawi Nomor 1, Jatiluhur, Purwakarta.

### 2.2. Peserta Forum Konsultasi Publik

Acara ini dihadiri oleh perwakilan stakeholder yang terdiri atas para pengguna layanan, pemerintah daerah, universitas/perguruan tinggi, dan otoritas setempat. Adapun para stakeholder atau pengguna layanan yang hadir meliputi :

1. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta (Pemda atau otoritas setempat)
2. Perum Jasa Tirta 2 (Otoritas dan pengguna layanan)
3. FPIK Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Cirebon (Universitas dan pengguna layanan)
4. FPIK Universitas Diponegoro (Pengguna layanan)
5. FPIK Universitas Gadjah Mada (Pengguna layanan)

### 2.3. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Forum Konsultasi Publik merupakan bentuk pelaksanaan amanat dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 maupun PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap instansi penyelenggara pelayanan publik wajib untuk melibatkan dan mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraannya.

Forum ini bertujuan untuk menjaring aspirasi, masukan, dan saran dari masyarakat terkait standar pelayanan yang disusun dan dikembangkan oleh BRPSDI. Rangkaian kegiatan Forum Konsultasi Publik BRPSDI dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Susunan Acara Forum Konsultasi Publik

Waktu (WIB)	Uraian Kegiatan	Keterangan
19.00 – 09.05	Pembukaan	Panitia
09.05 – 09.15	Sambutan	Kepala BRPSDI
09.15 – 10.00	Presentasi Standar Pelayanan	Kasubag Umum BRPSDI
10.00 – 10.15	Coffee Break	Panitia
10.15 – 11.30	Diskusi dan Tanya Jawab	Panitia
11.30 – 11.45	Penandatanganan Berita Acara Forum Konsultasi Publik	Kepala BRPSDI dan Stakeholder
11.45 – 11.50	Foto Bersama	Panitia
11.50 – 12.00	Penutupan	Panitia

Kegiatan forum konsultasi publik BRPSDI dimulai pada pukul 09.00 hingga pukul 11.30 WIB. Kegiatan dibuka oleh Kepala BRPSDI sebagai penyedia layanan. Kepala BRPSDI, Iswari Ratna Astuti, dalam sambutannya menegaskan pentingnya keterlibatan publik dalam setiap proses perbaikan layanan dan menegaskan bahwa BRPSDI berkomitmen memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan responsif sebagai prioritas utama.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan layanan publik yang terdapat di BRPSDI oleh Kasubag Umum BRPSDI yang diwakili oleh Penanggung Jawab Pelayanan Teknis. Setelah pemaparan selesai dilakukan sesi diskusi dimana beberapa stakeholder memberikan masukan terkait layanan yang disampaikan. Pada sesi ini terdapat beberapa masukan dari pengguna layanan sebagai berikut :

1. Perlu untuk memperluas lingkup layanan jasa sewa untuk asrama dan ruang pertemuan tidak hanya untuk kegiatan magang mahasiswa atau kegiatan yang khusus di BRPSDI saja, namun juga untuk masyarakat umum;
2. Perlu adanya koreksi dan penyesuaian nama tarif untuk layanan sewa alat. Sebaiknya namanya mengikuti nama yang ada di PP nomor 85 tahun 2021, jangan membuat nama tersendiri.
3. Untuk penyesuaian tarif di PP Nomor 85 dinilai terlalu mahal, disarankan untuk dapat diajukan penurunan tarif saat pembahasan di lingkup KKP.

Penandatanganan berita acara dilakukan di penghujung acara, dan dilakukan sebagai bentuk komitmen BRPSDI dalam menindaklanjuti saran dan masukan yang diberikan untuk menuju pelayanan publik yang lebih baik. Hasil dari FKP ini akan dijadikan dasar dalam penyempurnaan kebijakan dan penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

### **III. PENUTUP**

#### **3.1. Kesimpulan**

Forum Konsultasi Publik terhadap produk layanan BRPSDI telah terlaksana dengan baik dan menunjukkan pelibatan masyarakat yang konstruktif. Berdasarkan hasil pelaksanaan forum tersebut, dapat disimpulkan bahwa Standar Pelayanan dan Prosedur Operasional Baku (SOP) yang diterapkan BRPSDI telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mendukung penyelenggaraan pelayanan publik secara profesional.

Namun demikian, forum juga menghasilkan sejumlah rekomendasi yang perlu menjadi perhatian. Salah satu rekomendasi yang disampaikan adalah perlunya perluasan ruang lingkup layanan, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan aset berupa lahan atau bangunan, seperti aula dan asrama BRPSDI, untuk kegiatan sewa bagi masyarakat umum atau instansi lain. Selain itu, terdapat usulan untuk melakukan koreksi dan penyesuaian nama tarif untuk layanan sewa alat. Sebaiknya namanya mengikuti nama yang ada di PP nomor 85 tahun 2021, jangan membuat nama tersendiri. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengguna layanan dalam memahami jenis layanan serta besaran tarif yang dikenakan.

Tindak lanjut terhadap masukan tersebut dipandang sangat penting sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan, guna menjamin mutu pelayanan publik BRPSDI yang responsif, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

#### **3.2. Saran**

Untuk menjamin kualitas dan keberlanjutan pelayanan publik, ketersediaan anggaran yang memadai menjadi faktor krusial yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, penyelenggara pelayanan publik perlu secara proaktif merencanakan kebutuhan anggaran berdasarkan analisis beban kerja, target kinerja, dan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa pengusulan anggaran dilakukan secara tepat waktu, akuntabel, dan selaras dengan prioritas yang telah ditetapkan. Kolaborasi antar bagian juga diperlukan untuk efektifitas penggunaan dana. Dengan pengelolaan anggaran yang baik, layanan publik tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga mampu memberikan dampak peningkatan yang nyata.

## **LAMPIRAN KEGIATAN**

1. Berita Acara Kegiatan Forum Konsultasi Publik
2. Daftar Hadir
3. Notulensi Kegiatan
4. Dokumentasi

## LAMPIRAN 1. BERITA ACARA



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER**  
**DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN**  
JALAN CILALAWI NO.1 JATILUHUR, PURWAKARTA, JAWA BARAT  
TELEPON (0264) 8307265, FAKSIMILI (0264) 8307265

### **BERITA ACARA** **FORUM KONSULTASI PUBLIK 2025**

Pada Hari Kamis Tanggal Tujuh Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (17-07-2025), telah dilaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik untuk Pelayanan Publik di BRPSDI yang dihadiri oleh pimpinan pelayanan, pengelola dan pelaksana serta para stakeholder dan pengguna layanan. Forum Konsultasi Publik meliputi aspek sebagai berikut:

1. Review Standar Layanan
2. Review SOP
3. Review Pelaksanaan Layanan

Hasil Forum Konsultasi Publik merekomendasikan sebagai berikut:

No	Temuan	Rekomendasi	Rencana pelaksanaan
1.	Perlu tambahan layanan sewa asrama untuk selain mahasiswa	Akan dilakukan diskusi lebih lanjut untuk menambah layanan	TW III Tahun 2025
2.	Perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian harga terkait sewa alat	Penyesuaian SK terkait sewa alat sesuai dengan PP 85 Tahun 2021	TW IV Tahun 2025

Semua pihak yang hadir dapat menerima tindak lanjut/ rekomendasi sesuai jangka waktu dan berkomitmen untuk menindaklanjuti sebagai upaya peningkatan kualitas layanan publik.

Pimpinan unit penyelenggara akan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap tindak lanjut perbaikan oleh unit penyelenggara layanan sesuai dengan rekomendasi dan jangka waktu perbaikan yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

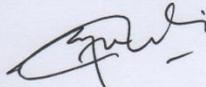
Purwakarta, 17 Juli 2025



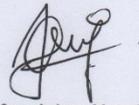
Atep Ginanjar  
(Dinas Peternakan dan Perikanan  
Kab. Purwakarta)



Leni Mulyani  
(Lab Lingkungan Perum Jasa Tirta II)



Abdul Hadi  
(FPIK UNTAG Cirebon)



Rifaa Jahra Nuraini  
(Mahasiswa UNDIP)



Siti Wanda Nurhamidah  
(Mahasiswa UGM)

Pimpinan Unit Penyelenggara



Iswari Ratna Astuti 

## LAMPIRAN 2. DAFTAR HADIR KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK



<b>FORMULIR BRPSDI</b>	No. Dokumen :
	Edisi/Tanggal :
<b>DAFTAR HADIR</b>	Revisi/Tanggal :
	Halaman :

Hari/Tanggal : Kamis, 17 Juli 2015  
 Tempat : BRPSDI  
 Kegiatan : Forum Konsultasi Pelayanan Publik

No.	Nama	Instansi	Email	No Telp.	Tanda Tangan
1	Ieni Mulyani	PST II	Mulyani.Ieni@ptt.com	081287723778	
2	Abdul Hadi	LINTAS CRB	ajieabdullah@gmail.com	0878 3211 5656	
3	Agus Koesoema	Diskominfo	Agus.koesoema@diskominfo.go.id	087877621856	
4	Atep Ghaungjar	Bina Transport Dukawan	atep.ghaungjar@gmail.com	08121029550	
5	A. Fahmi	BRPSDI	fahmi.a@gmail.com	08136793854	
6	Nanang W	BRPSDI			
7	Fitri	BRPSDI	fitritiskandor@gmail.com	081318266032	
8	Arima Dewi C	BRPSDI	arimadewi28@gmail.com	085799135120	
9	Agus Arifin Sentosa	BRPSDI	agusarifinsentosa@gmail.com	0822209001	
10	Muhammad Rizky P	BRPSDI	r.p.rizky@gmail.com	081283853833	
11	Audika Luty EH	BRPSDI	audikalutyeh@gmail.com	08529099059	
12	Rahmat. S	BRPSDI	sarbini.rs@gmail.com	087779640820	
13	Astri Suryandari	BRPSDI	suryandari.astri@gmail.com	0812008432	
14	Rifaa Jahra N	UNDIP	jahra.rifaa@gmail.com	08114587925	
15	Siti Wanda N	UGM	sitiwandanurhamidah@gmail.com	081023971913	
16	Dimas A. Hediarto	BRPSDI	dimas.brpsi@gmail.com	081314295716	

© Dokumen ini milik BRPSDI. Isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk diagandakan atau disalin tanpa izin dari BRPSDI.



**FORMULIR  
BRPSDI  
DAFTAR HADIR**

No. Dokumen :  
Edisi/Tanggal :  
Revisi/Tanggal :  
Halaman :

17	Ind. Arman	BRPSDI	indarman@gmail.com	085770074	[Signature]
18	Susman	BRPSDI	gusman279@gmail.com	0818213938	[Signature]
19	Santoso O	- - -	santoso.brpsdi@gmail.com	0857 2040 3757	[Signature]
20	Arson	"			[Signature]
21	yayat.	- - -	hendayana.yayat@gmail.com		[Signature]
22	Fuli. R. Fulu	BRPSDI	fuli.mano.6@gmail.com	08184665379	[Signature]
23	dian w.	BRPSDI	-	-	[Signature]
24	tatoh 1	BRPSDI	-	-	[Signature]
25	Agus Kosuarta	BRPSDI	aguskosuarta@gmail.com	081793322150	[Signature]
26	Lawari Patra Astuti	BRPSDI			[Signature]
27	Kayungul	- - -			[Signature]
28	Henra.k	- - -	henra8424@gmail.com	08121861582	[Signature]
29	Hertan.s	"		081579210528	[Signature]
30	Agus.s	- - -		083861217365	[Signature]
31	Roni.s	- - -	roni.sahroni@gmail.com	08762259999	[Signature]
32	Wandi.s	- - -		081293914322	[Signature]
33	ADAM A.	- - -	adamamawira@gmail.com	082125295190	[Signature]
34	Agus. A.	- - -	agus.ardiansyah@gmail.com	085212469432	[Signature]
35	RISWANTI	BRPSDI			[Signature]
36	Reni Indriyani	- - -	reniindriyani@gmail.com	085509147534	[Signature]



### LAMPIRAN 3. NOTULENSI KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

	<b>FORMULIR BRPSDI</b>	No. Dokumen : FR-2.2.02
		Edisi/Tanggal : 1 / 15 Februari 2023
		Revisi/Tanggal : - / -
	<b>NOTULA</b>	Halaman : 1 dari 5

#### NOTULA FORUM KONSULTASI PUBLIK

Hari/Tanggal : Kamis, 17 Juli 2025  
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Aula Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan  
Agenda : Forum Konsultasi Publik "Mewujudkan Pelayanan Publik yang Inklusif dan Responsif melalui Partisipasi Masyarakat"  
Peserta : 41 orang  
Notulis : Arini Dewi Chintyana

**Isi Pertemuan :**

Sesi Pemaparan:

Kegiatan Forum Konsultasi Publik "Mewujudkan Pelayanan Publik yang Inklusif dan Responsif melalui Partisipasi Masyarakat" dihadiri oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta atau yang mewakili, Kepala Laboratorium Lingkungan Perum Jasa Tirta II atau yang mewakili, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon atau yang mewakili dan seluruh pegawai Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan.

Dalam kegiatan ini, Kepala BRPSDI memberikan sambutan selamat datang kepada para undangan dan menyampaikan bahwa kegiatan forum konsultasi publik ini menjadi wadah dialog kami dengan para *stakeholder* sebagai pengguna layanan publik BRPSDI, dalam menunjang layanan publik yang lebih baik. Layanan publik BRPSDI membutuhkan saran dan masukan dari Bapak dan Ibu yang hadir disini dalam penyelenggarannya, terdapat beberapa layanan publik yang ada di BRPSDI, yaitu; Layanan penggunaan peralatan dan mesin, Layanan penggunaan tanah dan bangunan, Layanan jasa uji laboratorium, dan Layanan Bimbingan Teknis/Konsultasi (Magang). Kami berharap masukan positif dan objektif untuk penyempurnaan kebijakan untuk standar layanan yang lebih baik kedepannya.

Selanjutnya presentasi standar pelayanan dan SOP oleh Kasubag Umum BRPSDI yang diwakili oleh PJ Pelayanan Teknis, Dyah Ika Kusumaningtyas. BRPSDI memiliki beberapa layanan publik yang bisa dimanfaatkan oleh para *Stakeholder*, Standar Layanan Publik di BRPSDI antara lain ;

1. Layanan Penggunaan Peralatan dan Mesin, seperti untuk mengambil contoh *plankton* dengan *hydrophone* dan *benthos*, persyaratannya yaitu mengisi form permohonan, surat permohonan dari instansi/pribadi dan fotocopy kartu identitas. Sistem, Mekanisme dan

	<b>FORMULIR BRPSDI</b>	No. Dokumen : FR-2.2.02
	<b>NOTULA</b>	Edisi/Tanggal : 1 / 15 Februari 2023
		Revisi/Tanggal : - / -
	Halaman : 2 dari 5	

Prosedur (SOP) alat yang akan disewa akan di cek terlebih dahulu oleh petugas dan jawabannya akan di terima paling lambat 3 hari kerja setelah mengajukan form permohonan. Biaya/Tarif pelayanan berlaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, layanan penggunaan peralatan dan mesin di BRPSDI memberikan produk berupa jasa.

2. Layanan Penggunaan Tanah dan Bangunan untuk menunjang perikanan, sementara kami batasi untuk kegiatan yang ada di BRPSDI seperti kunjungan edukatif ataupun siswa magang di BRPSDI, persyaratannya yaitu mengisi form permohonan, surat permohonan dari instansi/pribadi dan fotocopy kartu identitas. Sistem, Mekanisme dan Prosedur (SOP) nya adalah setelah mengisi form peminjaman aula atau guest house, petugas akan mengecek ketersediaan sarpras yang akan di sewa dan jawaban/Keputusan paling lambat 3 hari kerja. Biaya/Tarif pelayanan berlaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Layanan Pemeriksaan/Pengujian Laboratorium, persyaratannya yaitu mengisi form permohonan, surat permohonan dari instansi/pribadi, Sistem, Mekanisme dan Prosedur (SOP) nya yaitu pemohon menemui petugas dengan membawa sampel yang akan diuji dan petugas akan mengecek ketersediaan sumber daya dan kemampuan uji, untuk menganalisis sampel diberi waktu paling lama 60 menit apakah sampel tersebut diterima atau tidak, apabila diterima waktu pengerjaan sampel sampai terbitnya laporan hasil uji adalah 14 hari kerja. Laporan hasil uji dibuat oleh Analis Laboratorium. Biaya/Tarif pelayanan berlaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Produk pelayanan nya adalah laporan hasil uji dalam bentuk fisik dan digital.
4. Layanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis, persyaratannya yaitu mengisi form permohonan, surat permohonan dari instansi/pribadi dan fotocopy kartu identitas. Sistem, Mekanisme dan Prosedur (SOP) nya adalah setelah mengisi formulir permohonan informasi jawaban/keputusannya paling lambat 3 hari kerja, mahasiswa/siswa yang dinyatakan diterima diwajibkan melaksanakan PKL/magang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di BRPSDI. Periode PKL/magang menyesuaikan dengan

	<b>FORMULIR BRPSDI</b>	No. Dokumen : FR-2.2.02
		Edisi/Tanggal : 1 / 15 Februari 2023
	<b>NOTULA</b>	Revisi/Tanggal : - / -
		Halaman : 3 dari 5

rekomendasi sekolah/ perguruan tinggi/ kampus masing-masing, mahasiswa/ siswa PKL/magang wajib membuat laporan akhir atau laporan hasil kegiatan selama pelaksanaan PKL/magang, untuk kegiatan magang ini tidak dipungut biaya. Produk pelayanan berupa sertifikat magang berbentuk digital.

**Sesi diskusi dan Tanya Jawab;**

1. Bu Leny – PJT II (Unit Laboratorium) Kerjasama dengan BRPSDI

*"Layanan Publik BRPSDI ini sangat membantu sekali dalam proses usaha di PJT II karena ada beberapa parameter yang tidak bisa dilakukan di PJT II karena keterbatasan alat di kami, diharapkan lebih banyak lagi parameter untuk pengujiannya. Terkait Sewa guest house, di PJT II ada pengujian udara rutin di lingkungan Jatiluhur yang harus 24 jam sehingga kami harus mengakomodasi untuk penginapannya, dikarenakan harga hotel di Jatiluhur melebihi budget kami yang saat ini sedang efisiensi anggaran juga. Apakah boleh kita untuk menyewa selain untuk kegiatan magang? Apakah harganya bisa di publish?"*

**Jawaban :**

Untuk penambahan parameter uji sepertinya belum bisa, karena parameter uji kita terhambat akreditasi, SDM dan Penganggaran, karna ada penganggaran bahan kimia, dan yang saat ini kami terima adalah parameter yang tidak memerlukan bahan kimia. Untuk asrama tarif sesuai PP Nomor 85 Tahun 2021 itu untuk perorangan mahasiswa, Rp. 20.000/hari Non AC, Rp. 40.000/hari AC, untuk umum belum menemukan di PP 85. Nanti peserta FKP dapat lebih jelas melihat kondisi asrama atau guest house akan ada sesi touring melihat semua layanan yang ada di kami, dan untuk sewa ruang pertemuan 350.000/hari dengan kapasitas <50 orang. Nanti kami diskusikan terlebih dahulu dengan Kasubag umum, Karena selama ini kami hanya memfasilitasi untuk kegiatan-kegiatan yang ada di kami misal kunjungan edukatif, magang, dsb.

2. Dinas Perikanan dan Peternakan Purwakarta

*"Layanan Publik di BRPSDI ini ternyata bisa sinkronasi dengan bidang perikanan kami, karna ada beberapa kegiatan yang sesuai seperti penyewaan tanah dan bangunan, karena dalam pelatihan untuk pembudi daya. Serta untuk Parameter uji, pada dinas perikanan dan peternakan pengujian kualitas air rutin tiap taun di kolam darat, Uji kimia dan logam berat. Mungkin kedepannya kami bisa kerjasama. Apakah bisa diinformasikan harga untuk rencana kegiatan kami di tahun depan?"*

	<b>FORMULIR BRPSDI</b>	No. Dokumen : FR-2.2.02
		Edisi/Tanggal : 1 / 15 Februari 2023
	<b>NOTULA</b>	Revisi/Tanggal : - / -
		Halaman : 4 dari 5

**Jawaban ;**

Untuk uji air dahulu kami terakreditasi, tetapi saat ini kami tidak melanjutkan akreditasi karena terbatas tuis bukan riset lagi, bisa ke PJT II yang terakreditasi dan untuk fitoplankton dan zooplankton ke kami karena selama ini pengujiannya kami ke arah biologi. Layanan uji yang tersedia di kami; Fitoplankton, Zooplankton, Analisis isi Saluran Pencernaan Ikan, Fekunditas, Diameter Telur, pH, Daya Hantar Listrik, Turbiditas, Padatan Terlarut Total.

3. Agus Arifin

*Saran untuk nama link nya disederhanakan lagi untuk memudahkan para pengguna layanan*

4. Riswanto

*"Terkait dengan tarif layanan yang sesuai PP PNPB 85 Tahun 2025, apakah evaluasi tarif ini bisa dilaksanakan per 5 tahun, karena untuk rincian sewa alat per item takutnya ada perbedaan persepsi dengan yang akan menyewa, Contoh harga Tabung selam compressor, tabung selam saja atau tabung selam dengan compressor. Berdasarkan pengalaman untuk beberapa lembaga yang menyewakan alat selam biasanya sifatnya ada juga yang perintilan yang dibilang satuan apabila di akumulasi jadi lebih mahal. Sebagai contoh di kepulauan seribu di satu set harganya 250.000, sewa tabung 100.000. untuk alat selam dasar 30.000. Tarif penyewaan PP No 85 Tahun 2021 terbilang terlalu mahal untuk alat selam, Untuk menampilkan tarif di BRPSDI, cukup Nomenklatur based PP saja tidak perlu disebutkan dengan jelas disebutkan secara general tidak meninterpretasikan secara sendiri. "*

Jawaban :

PP 85 tahun 2021 ini seluruh kementerian Kelautan dan perikanan. Biasanya evaluasinya per 5 tahun, dan untuk evaluasinya kita harus mengusulkan dengan biaya maintenance nya dan lain sebagainya, Untuk di PP nya sendiri rincian alat selam ada masing masing harga nya, mungkin nanti kami tim pelayanan public akan mengevaluasi terhadap penyebutan alat sewa agar tidak ada perbedaan persepsi dengan para penyewa.

5. Abdul Hadi UNTAG

*"Masukan saja bahwa untuk penyewaan peralatan selam bisa dievaluasi harganya agar lebih murah. Biasanya untuk sewa peralatan selam komplit dengan tabung 350 ribu. Untuk sewa peralan snorkel 25 ribu dan untuk isi tabung 60 ribu."*

	<b>FORMULIR BRPSDI</b>	No. Dokumen : FR-2.2.02
		Edisi/Tanggal : 1 / 15 Februari 2023
	<b>NOTULA</b>	Revisi/Tanggal : - / -
		Halaman : 5 dari 5

Selanjutnya peserta Forum Konsultasi Publik diajak untuk touring layanan ke sarana prasarana pelayanan public mulai dari ruang tunggu, meja pelayanan, meja pengaduan, dan asrama.

Acara selanjutnya yaitu Penandatanganan Berita Acara Forum Konsultasi Publik, Berita Acara ditandatangani oleh Kepala BRPSDI, Perwakilan dari Dinas Peternakan dan Perikanan, Perwakilan dari FPIK Untag dan Perwakilan dari PJT II, dan Kasubag Umum BRPSDI. Setelah acara penandatanganan, dilanjutkan dengan acara ramah tamah, foto bersama, dan ISOMA.

Demikian hasil pertemuan ini dibuat untuk menjadi dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan.

Jatiluhur, 17 Juli 2025

Notulis



Arini Dewi Chintyana

#### LAMPIRAN 4. DOKUMENTASI KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK



a. Pemaparan Jenis Layanan, Standar Pelayanan dan SOP Pelayanan Publik BRPSDI



b. Sesi Diskusi dan Tanya Jawab Forum Konsultasi Publik



c. Penandatanganan Berita Acara Forum Konsultasi Publik



d. Foto Bersama Forum Konsultasi Publik